

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Barat. Untuk memahami hubungan ini, diperlukan hubungan yang mendalam terhadap beberapa teori yang relevan.

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Siregar(2022) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya dan merupakan pendapatan yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Marseno & Mulyani (2020) menyatakan bahwa PAD adalah murni pendapatan daerah dan perannya sebagai indikator sejauh mana otonomi daerah dilaksanakan secara inklusif, realistis dan bertanggung jawab. Hidayah & Sari (2022) menjelaskan PAD merupakan seluruh pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah berarti menyelidiki dan menentukan mana yang sebenarnya merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti, membina, dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut dengan baik

untuk mencapai hasil yang maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang dipungut menurut ketentuan undang-undang dan terdiri atas: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) pendapatan lain yang sah, dan melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi daerah dengan fleksibilitas dalam mencari sumber daya keuangan untuk proyek mereka.

Pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui tiga cara utama:

1. Peningkatan sumber pendapatan, yaitu memperluas dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang ada, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
2. Efisiensi pengelolaan, yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan anggaran yang lebih baik dan pengurangan pemborosan.
3. Inovasi kebijakan, yaitu mengembangkan kebijakan baru yang inovatif untuk menarik investasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat ketentuan yang melarang pemerintah daerah untuk melakukan

beberapa tindakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara spesifik, pemerintah daerah dilarang untuk:

1. Menetapkan peraturan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, hal ini bertujuan untuk mencegah kebijakan yang dapat memberatkan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas, ini termasuk larangan terhadap kebijakan yang dapat menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan impor dan ekspor, yang penting untuk kelancaran ekonomi.

Indikator variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

Indikator-indikator yang dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pajak Daerah**

Menurut Ningsih (2019), pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pendapatan pajak untuk pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- b) Pajak kendaraan bermotor.
- c) Pajak air tanah.
- d) Pajak rokok.
- e) Pajak hotel.
- f) Pajak restoran.
- g) Pajak hiburan.
- h) Pajak reklame.
- i) Pajak penerangan jalan.
- j) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- k) Pajak parkir.
- l) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## **2. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997: “Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah khusus untuk kepentingan seseorang atau badan”. Penerimaan

pajak dibayarkan langsung oleh orang yang menggunakan layanan dan biasanya mencakup seluruh atau sebagian biaya cakupan layanan (Marseno & Mulyani, 2020).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Rizal & Erpita, 2019).

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hartiningsih & Halim (2015) menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika keuntungan diperoleh dari operasi ini, maka keuntungan tersebut dapat dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tersebut. Menurut Mentayani & Rusmanto (2013), untuk menutupi kebutuhan keuangan APBD yang relatif besar, daerah juga dibekali sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah dilaksanakan oleh perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang, yang modal seluruhnya atau sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup beberapa objek pendapatan, antara lain:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ini termasuk laba yang diperoleh dari investasi pemerintah daerah di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh daerah.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu pendapatan yang berasal dari investasi pemerintah daerah di perusahaan-perusahaan milik negara.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat, ini mencakup laba yang diperoleh dari investasi di sektor swasta.
- d) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, yaitu pendapatan dari penjualan aset-aset milik daerah.
- e) Jasa giro dan pendapatan bunga deposito, yaitu pendapatan yang diperoleh dari simpanan uang daerah di bank.
- f) Pendapatan dari tuntutan ganti rugi, yaitu penerimaan yang berasal dari klaim ganti rugi terhadap pihak ketiga.
- g) Pendapatan denda, termasuk denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, dan denda retribusi.
- h) Pendapatan dari pengembalian, yaitu penerimaan yang terkait dengan pengembalian dana atau biaya.

#### **4. Lain-lain PAD yang Sah**

Menurut Rizal & Erfita (2019), lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah

daerah. Pendapatan ini tidak termasuk dalam PAD, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Hartiningsih & Halim, 2015).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah mencakup beberapa sumber pendapatan yang sah dan diatur oleh peraturan daerah. Berdasarkan informasi dari Mentayani & Rusmanto (2013) dan sumber lainnya, berikut adalah komponen utama dari lain-lain PAD yang sah:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset milik daerah.
- b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yaitu pendapatan dari penggunaan aset daerah untuk kegiatan yang menghasilkan uang.
- c) Jasa giro, yaitu pendapatan yang diperoleh dari layanan perbankan atau jasa keuangan.
- d) Pendapatan bunga, yaitu bunga yang diperoleh dari simpanan atau investasi daerah.
- e) Tuntutan ganti rugi, yaitu pendapatan dari klaim ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh daerah.
- f) Keuntungan selisih nilai tukar, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

- g) Komisi dan potongan, yaitu pendapatan dari komisi atau potongan yang diperoleh akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### **2.1.2 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah komponen dari TKD, menurut Pasal 1 Ayat (71) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana ini dialokasikan untuk mengurangi perbedaan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Dana Alokasi Umum, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana ini berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.

Menurut Gamela et al., (2024), dana alokasi umum adalah *block grant*, sehingga dapat digunakan dengan fleksibel dan tidak memiliki banyak aturan seperti hibah kategori lainnya. Fungsi dana alokasi umum adalah untuk mengimbangi ketimpangan keuangan antar-daerah karena adanya transfer dana bagi hasil yang diterima oleh daerah.

Dana Alokasi Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah. Ini dilakukan dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap daerah.

Twinki & Widiyanti (2022) menjelaskan bahwa dana alokasi umum dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota dimana besaran yang ditetapkan paling sedikit 26% dari pendapatan nasional bersih yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi dana alokasi umum untuk wilayah provinsi, kabupaten, dan kota ditentukan dan disesuaikan dengan keseimbangan kapasitas antara provinsi, kabupaten, dan kota.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan penyaluran dana alokasi umum disebutkan bahwa alokasi DAU setiap daerahnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, dan dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.

1. Bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya
  - a) Alokasi untuk kelurahan didasarkan pada jumlah kelurahan yang ada.
  - b) Alokasi untuk PPPK ditentukan berdasarkan jumlah pegawai dan jumlah bulan penggajian.

- c) Untuk bidang pendidikan, alokasi didasarkan pada data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tersebut.
  - d) Untuk bidang kesehatan, alokasi didasarkan pada indikator kinerja kesehatan, seperti usia harapan hidup dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.
2. Bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya
- Penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, dan dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari jumlah yang dialokasikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, penyaluran dana alokasi umum dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum provinsi ke rekening kas umum daerah, dan dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran dana alokasi umum berdasarkan pasal diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum, cara menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan minimal sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto, yang merupakan penerimaan negara setelah dikurangi dengan dana bagi hasil yang dibagikan kepada daerah.
2. Proporsi alokasi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota adalah 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota dari total DAU nasional.

Formula perhitungan DAU, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Komponen Perhitungan:

- Alokasi Dasar (AD) = Mengacu pada proyeksi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun ke depan, yang dihitung berdasarkan jumlah PNSD dan kebijakan penggajian.
- Celah Fiskal (CF) = Selisih antara Kebutuhan Fiskal (KbF) dan Kapasitas Fiskal (KpF).
- Kebutuhan Fiskal (KbF) = Dihitung dengan mempertimbangkan beberapa variabel, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- Kapasitas Fiskal (KpF) = Diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

### 2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN, SiLPA mengacu pada selisih antara jumlah realisasi pembiayaan anggaran dengan defisit anggaran yang terjadi pada periode pelaporan (Republik Indonesia, UU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN). SiLPA tahun sebelumnya digunakan sebagai pembiayaan pendapatan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, serta untuk menunjang kegiatan yang sedang berlangsung dan kewajiban pembiayaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun yang digunakan.

Keberadaan dan besaran SiLPA berkaitan erat dengan tingkat belanja pemerintah daerah dan perkembangan pendapatan daerah (Sumantri, 2020). SiLPA bisa tinggi apabila belanja daerah relatif rendah atau terdapat efisiensi fiskal pada tahun anggaran tertentu. Sebaliknya, ketika tingkat belanja daerah tinggi, jumlah yang diterima dari SiLPA cenderung rendah. Jika belanja daerah melebihi pendapatan daerah dan terjadi defisit anggaran, maka bisa saja terjadi kekurangan anggaran. Untuk menghitung SiLPA, gunakan rumus berikut:

$$\text{SiLPA} = \text{Pelampauan Pendapatan Daerah Realisasi} + \text{Penghematan Efisiensi Belanja}$$

#### **2.1.4 Belanja Modal**

Yang dimaksud dengan belanja modal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2003 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan mencakup belanja anggaran untuk perolehan atau penambahan aset tetap dan atau aset lainnya. Manfaat ekonomi diperoleh lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi batas nilai minimal kapitalisasi aktiva tetap atau aktiva lain yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal mencakup belanja modal untuk perolehan tanah, bangunan dan struktur, peralatan dan aset tidak berwujud.

Belanja modal dapat berupa pembangunan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan asli daerah. Dalam mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah harus mampu memperhitungkan pendapatan daerah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah (Hidayah & Sari, 2022).

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana. Kebutuhan ini diperlukan untuk membuat tugas pemerintah dan fasilitas publik lebih mudah dilaksanakan (Sumantri, 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang klasifikasi belanja modal dalam anggaran pemerintah. Dalam

peraturann ini, belanja modal dikategorikan ke dalam enam kategori utama, yaitu:

1. Belanja modal tanah, yaitu pengeluaran yang terkait dengan pengadaan atau pembebasan tanah.
2. Belanja modal gedung dan bangunan, termasuk biaya pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan gedung serta infrastruktur lainnya.
3. Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu pembelian atau pemeliharaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk operasional.
4. Belanja modal jaringan dan infrastruktur, yaitu pengeluaran untuk pembangunan jaringan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pemerintah.
5. Belanja modal lainnya, mencakup belanja modal yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti pengadaan *software* atau aset tak berwujud.
6. Belanja modal untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, ada enam kategori belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jaringan dan infrastruktur, belanja modal lainnya,

serta belanja modal untuk pengembangan sumber daya manusia. Untuk menghitung belanja modal, gunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \\ & \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Jaringan dan Infrastruktur} + \\ & \text{Belanja lainnya} + \text{Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia} \end{aligned}$$

### 2.1.5 *Stewardship Theory*

Teori ini memberikan penjelasan tentang situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi fokus pada hasil sasaran utama kepentingan organisasi (Siregar, 2022). Pemerintah daerah dipercaya bertindak sesuai kepentingan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memanfaatkan sumber daya secara ekonomis dan efisien, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif dengan menggunakan teori *stewardship*.

### 2.1.6 Teori *Flypaper Effect*

Teori *flypaper effect* adalah teori yang menjelaskan kondisi ketika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat daripada pendapatan asli daerahnya sendiri (Swasito, 2021). Salah satu penyebab *flypaper effect* yaitu pemerintah daerah belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan finansial yang dapat menghambat tercapainya tujuan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu meningkatkan kemampuannya dalam menggali pendapatan asli daerah.

### 2.1.7 Teori Keynesian

Teori Keynesian berfokus pada hubungan antara pendapatan dan konsumsi (Twinki & Widiyanti, 2022). Menurut Keynes, konsumsi tergantung pada pendapatan, dan secara proporsional akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Dalam konteks pemerintah, belanja modal dapat dianalogikan sebagai “konsumsi” yang bergantung pada pendapatan daerah dan sumber-sumber fiskal lainnya.

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut menjelaskan penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dan bahan pertimbangan penelitian ini, serta memberikan informasi lebih lanjut tentang ruang lingkup penelitian:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| No  | Peneliti, Tahun, Judul Penelitian                                                                  | Persamaan                                                                                                                                | Perbedaan                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                       | Sumber Referensi                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                      | (4)                                | (5)                                                                                                                                                                    | (6)                                                                                                                           |
| 1   | Indra Gunawan Siregar (2022) Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal | Variabel: DAU, PAD, belanja modal<br><br>Metode analisis regresi data panel<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat | Variabel: DAK, pertumbuhan ekonomi | Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sementara dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan tidak berpengaruh | <i>Dynamic Management Journal</i><br><br>Vol 6 No. 2<br><br>ISSN (Online) 2580-2127<br><br>Universitas Muhammadiyah Tangerang |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)                                                                                                                                     | (4)                                                                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                             | (6)                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                            | terhadap belanja modal.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
| 2   | Anisa May, Rafrini Amyulianthy, Tryas Chasbiandani (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, DAK terhadap Belanja Modal                                                                                                                                                    | Variabel: PAD, DAU, Belanja Modal<br><br>Metode analisis regresi linier berganda<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Jawa Barat | Variabel: DBH, DAK<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Malang Raya | PAD, DBH, DAU berpengaruh signifikan. Sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, tetapi secara simultan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.                                                                                       | Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila<br><br>Vol 2 (1)<br><br>E-ISSN 2776-1835<br>P-ISSN 2774-9517<br><br>Universitas Pancasila           |
| 3   | Bakhrudin, M. Arief Setiawan, Sutrisno (2021) Pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK terhadap Belanja Modal untuk Peningkatan Bisnis (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Malang Raya)                                                                                                           | Variabel: PAD, DAU, Belanja Modal<br><br>Metode analisis regresi linier berganda                                                        | Variabel: DBH, DAK<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Malang Raya | PAD berpengaruh negatif, sedangkan DAU DBH dan DAK berpengaruh positif.                                                                                                                                                                                         | Jurnal Administrasi dan Bisnis<br><br>Vol 15, No 2<br><br>ISSN 1987-726X<br>eISSN 2715-0216<br><br>Akuntansi Politeknik Negeri Malang |
| 4   | Herlina Novita, Anita Yuli Sari Akbar Purba, Erika Sri Dwina Br Perangin-Angin, Engie Aurel Caroline, Julius Kristofan Zai (2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018-2020 | Variabel: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Belanja Modal<br><br>Analisis statistik, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis      | Variabel: DAK<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara   | Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh parsial PAD dan DAK terhadap belanja modal dapat terlihat, tetapi tidak terlihat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum | Owner Riset & Jurnal Akuntansi<br><br>Vol 6 No 2<br><br>e-ISSN: 2548-9224<br>p-ISSN: 2548-7507<br><br>Universitas Prima               |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                             | (4)                                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                             | (6)                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                      | terhadap belanja modal.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| 5   | Sarah Frantiska Santoso, Sofyan Bantasyam, Shinta Budi Astuti (2021) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019) | Variabel: DAU, Belanja Modal<br><br>Analisis regresi data panel<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat | Variabel: DAK, DBH<br><br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Sumatera Barat                    | Dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal sedangkan dana alokasi khusus berpegaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.                 | Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila Vol 1 (2)<br><br>e-ISSN 2776-1835<br>p-ISSN 2774-9517<br><br>Universitas Pancasila                                 |
| 6   | Nadiah Dwi Retno, Jacobus Widiatmoko (2019) PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017)                                             | Variabel: PAD, DAU, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi<br><br>Metode analisis regresi berganda                                  | Variabel: DAK, DBH, Luas Wilayah<br><br>Tempat penelitian: Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali | PAD, DAK dan daerah berpengaruh positif signifikan, DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol. 8, No. 1<br><br>ISSN: 2656-5955 (media online): 2656-8500 (media cetak)<br><br>Universitas Stikubank |
| 7   | Bintang Marseno, Erly Mulyani (2020) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi                                                                             | Variabel: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Belanja Modal<br><br><i>Multiple linear regression analysis</i>                             | Variabel: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Sumatera Barat   | PAD dan Luas Wilayah memiliki <i>effect</i> pada belanja modal.                                                                                                                                 | Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 4<br><br>ISSN: 2656-3649 (Online)<br><br>Universitas Negeri Padang                                            |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                       | (4)                                                                                    | (5)                                                                                                                                                                                       | (6)                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019)                                                                                                            |                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| 8   | Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, Parmadi (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi | Variabel: PAD, DAU, Belanja Modal<br><br>Model regresi data panel         | Variabel: DAK<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi               | PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian, secara parsial hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.           | Jurnal Paradigma Ekonomika<br><br>Vol. 14. No. 1<br><br>ISSN: 2085-1960 ( <i>print</i> )<br><br>Universitas Jambi                     |
| 9   | Zia Afkarina (2017) Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal                                                                                                        | Variabel: PAD, DAU, SILPA, Belanja Modal<br><br>Analisis berganda         | Variabel: Luas Wilayah<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur | Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal. | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi<br><br>Vol 6, No 8<br><br>e-ISSN: 2460-0585<br><br>STIESIA Surabaya                                   |
| 10  | Maryati, Nir Setyo Wahdi, Aprih Santoso (2022) Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten se Jawa Tengah                                                  | Variabel: PAD, DAU, Belanja Modal<br><br>Analisis regresi linier berganda | Variabel: DAK, Luas Daerah<br><br>Tempat penelitian: Kota/Kabupaten se Jawa Tengah     | Pendapatan asli daerah (PAD) dari belanja modal, akan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan luas daerah tidak berhubungan dengan alokasi                                 | <i>Journal of Business and Economics Research</i><br><br>Vol 3, No 2<br><br>ISSN 2716-4128 (media online)<br><br>Universitas Semarang |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                          | (3)                                                                                                                                              | (4)                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                   | anggaran belanja modal.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| 11  | Fajar Maulana, Wida Fadhlia (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh                             | Variabel: PAD, Belanja Modal<br><br>Analisis regresi linier berganda                                                                             | Variabel: DAK, Luas Wilayah<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh             | Pendapatan daerah, dana alokasi khusus, dan luas wilayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Pada uji parsial, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan luas wilayah mempengaruhi belanja modal. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi<br><br>Vol. 5, No. 3<br><br>E-ISSN 2581-1002<br><br>Universitas Syiah Kuala             |
| 12  | Kholida Atiyatul Maula, Kartika Nur Alfiyyah Isro'iyatul Mubarakah, Wiwiek Rabiatal Adawiyah, Christina Tri Setyorini (2023) <i>Factors Affecting Capital Expenditure In Districts in West Java Province</i> | Variabel: PAD, DAU, SiLPA, Belanja Modal<br><br>Analisis regresi linier berganda<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat | Variabel: DAK, DBH, Luas Wilayah<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan DAK, DBH, dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.                                                                                               | <i>Accounting Analysis Journal</i><br><br>Vol 12(2)<br><br>p-ISSN 2252-6765<br>e-ISSN 2502-6216<br><br>Universitas Singaperbangsa |
| 13  | Jefri Suryo Winarto, M.G. Kentris Indarti (2024) <i>Capital Expenditure: Antecedents and Its Impact on Economic Growth</i>                                                                                   | Variabel: PAD, DAU, SiLPA, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi<br><br>Pengujian model data panel                                                  | Variabel: DAK, DBH, Luas Wilayah<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | PAD, DBH, SiLPA, dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan                                     | <i>International Journal of Economics Development Research</i><br><br>Vol 5(3)<br><br>Universitas Stikubank                       |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                    | (4)                                                                                                                                       | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (6)                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | terhadap pertumbuhan ekonomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| 14  | Marsyaf Lawe Anasta (2019) <i>The Effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Area of Areas on Capital Expenditure (Case Study in Regency / City on Java Island in 2016)</i> | Variabel: PAD, DAU, Belanja Modal                                                                                                      | Variabel: DAK, Luas Daerah<br><br>Uji regresi linier berganda <i>cross-section</i><br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Pulau Jawa | Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan luas daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan luas daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. | <i>European Journal of Business and Management</i><br>Vol.11, No.16<br>ISSN 2222-1905<br>(Paper)<br>ISSN 2222-2839<br>(Online)   |
| 15  | Fitri Endayani, Kartika Berliani (2023) <i>Predictors of Capital Expenditures in Regency/City Regional Government in West Java Province 2017-2022</i>                                                                                         | Variabel: PAD, SiLPA, Belanja Modal<br><br>Uji regresi linier berganda<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat | Variabel: DBH                                                                                                                             | PAD memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. SiLPA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.                                                                                                                                             | <i>Journal of Accounting INABA</i><br>VOL 02, NO. 02<br>E-ISSN 2829-5404,<br>P-ISSN 2829-7040<br>Universitas Indonesia Membangun |
| 16  | Dayana Novita Candra Kumala (2018) Analisis Pengaruh                                                                                                                                                                                          | Variabel: PAD, DAU, Pertumbuhan                                                                                                        | Variabel: DAK, DBH                                                                                                                        | PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya                                                                                              |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                    | (4)                                                                                                      | (5)                                                                                                                                                                                                                       | (6)                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal (Studi Kasus pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)   | Ekonomi, Belanja Modal                                                                                                                 | Analisis jalur ( <i>path analysis</i> )<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | secara signifikan. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan belanja modal berpengaruh secara signifikan, sedangkan DAU dan DBH tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.                   | Universitas Brawijaya                                                                                    |
| 17  | Bela Sania Twinki, Dwi Retno Widiyanti (2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat                      | Variabel: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Belanja Modal<br><br>Uji model data panel<br><br>Tempat penelitian: Kabupaten/Kota Jawa Barat | Variabel: DAK, DBH                                                                                       | Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh signifikan. Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan. DBH berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan, DAK tidak berpengaruh. | <i>Journal of Development Economic and Social Studies</i><br><br>VOL 2 NO 3<br><br>Universitas Brawijaya |
| 18  | Rendy Alvaro, Adhi Prasetyo (2022) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia | Variabel: PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal<br><br>Uji model data panel                                                     | Variabel: DAK, DBH<br><br>Tempat penelitian: Provinsi Indonesia                                          | PAD, DAK, DBH memiliki efek positif yang signifikan. DAU tidak berpengaruh, sementara pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan. Selanjutnya, pertumbuha                                                  | <i>Jurnal Budget</i><br><br>VOL. 5, NO. 2<br><br>Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI               |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                             | (4)                                                                          | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                              | ekonomi, PAD dan DAU memiliki efek positif yang signifikan, tetapi DAK dan DBH memiliki efek negatif.                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 19  | Ferdian Putra (2017) Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014) | Variabel: Desentralisasi Fiskal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal Analisis regresi linier berganda | Variabel: Wilayah Tempat penelitian: Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat    | Luas Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. | Jurnal E-Jra Universitas Negeri Padang |
| 20  | Yuni Dwi Ningsih (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal                                                             | Variabel: PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal Analisis regresi linier berganda                         | Variabel: DAK Tempat penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat | Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.                                       | Universitas Tanjungpura Pontianak      |

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah elemen penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar atau panduan dalam menyusun dan mengorganisir ide-ide serta informasi yang relevan. Kerangka pemikiran dapat didefinisikan sebagai model konseptual yang menghubungkan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka untuk mendukung penelitian. Kerangka pemikiran merupakan dasar dari keseluruhan penelitian. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah struktur yang membantu peneliti dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Dengan kata lain, kerangka pemikiran berfungsi sebagai visualisasi alur logika dari tema yang akan diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah dan menjelaskan hasil penelitian. Kerangka pemikiran yang jelas akan memudahkan pembaca untuk memahami arah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### **2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal**

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah di daerah tersebut sesuai dengan peraturan.

Hidayah & Sari (2022) menegaskan bahwa semakin besar partisipasi pendapatan asli daerah dalam APBD, menunjukkan semakin lemahnya keterkaitan daerah dengan pusat akibat pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai alternatif belanja daerah untuk mencapai pembangunan. Dalam hal ini, alokasi atau kontribusi pendapatan asli daerah pada sebagian besar pemerintah daerah tergolong rendah dalam struktur APBD, dimana kontribusi PAD itu sendiri berupa subsidi dan dukungan, bagi hasil, pajak dan non pajak (Sumantri, 2020).

Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk memberdayakan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Gamela et al., 2024). Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai pendekatan, antara lain dengan meningkatkan pelayanan publik melalui belanja untuk meningkatkan investasi, yang salah satunya dapat dilakukan dengan belanja modal.

Setiap pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya untuk meningkatkan jumlah dana pendapatan asli daerah guna menciptakan infrastruktur daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula jumlah belanja modal yang dialokasikan pada daerah tersebut (Twinki & Widiyanti, 2022).

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Rizal & Erfita (2019), Ningsih (2019), serta Diva Ivana., (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022), Mentayani & Rusmanto (2013), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap besarnya belanja modal, dimana hal tersebut berlawanan dengan teori dan tujuan dari pendapatan asli daerah.

### **2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal**

Dengan dukungan sarana prasarana serta infrastruktur yang baik, selain pendapatan asli daerah, pemerintah menerima transfer dana alokasi umum yang merupakan bagian dana perimbangan. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, dana alokasi umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan dan pelayanan publik antar daerah. Ketika alokasi didasarkan pada celah fiskal dan alokasi dasar.

Daerah yang kebutuhan fiskalnya rendah namun potensi fiskalnya rendah akan menerima dana alokasi umum yang relatif sedikit dan sebaliknya (Azhar & Hermanto, 2021). Jika keseluruhan dana alokasi

umum pemerintah daerah besar, maka jumlah yang dialokasikan untuk belanja modal juga akan meningkat (Sundoro & Suhardjo, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Gamela et al., (2024), serta Twinki & Widiyanti (2022), menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja modal, yang berarti bahwa dana alokasi umum yang ditransfer pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan besarnya dana belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Diva Ivana et al., (2021), Putri et al., (2021), serta Elwarin et al., (2021) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

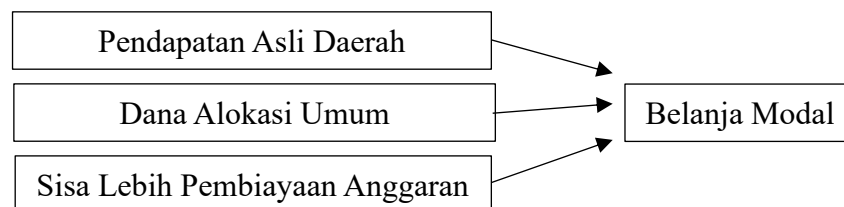
### **2.2.3 Hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja Modal**

SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dalam teori Keynes dapat dianalogikan dengan tabungan. SiLPA merupakan sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang tidak terpakai dan dapat digunakan untuk belanja di tahun berikutnya. SiLPA yang besar menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas untuk meningkatkan belanja modal di periode berikutnya, termasuk belanja modal, tergantung pada keputusan penggunaan anggaran tersebut.

Mentayani & Rusmanto (2013), Fahrezi et al., (2018), serta Putra (2017) menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal, berarti peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan besarnya

dana belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Rusdi (2021), serta Afkarina (2017) menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan tinjauan teori penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang diajukan, sebagai landasan pembentukan hipotesis, berikut gambaran kerangka penelitian ini. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (*Independent*) terhadap variabel terikat. Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (X3), serta variabel *dependent*nya adalah belanja modal (Y). Kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**

### **Kerangka Pemikiran**

## **2.3 Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang sifatnya sementara, atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi yang diajukan sebagai jawaban atas masalah penelitian yang diidentifikasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada dalam populasi.

Hipotesis dibuat berdasarkan teori atau asumsi awal dan digunakan untuk memberikan arah pada penelitian, yang nantinya akan diuji untuk mengetahui apakah benar atau tidak. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal.
2. Diduga secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.